

Penerimaan negara dari sektor sawit: Apakah
Inpres Moratorium Sawit berdampak pada
menurunnya penerimaan negara dari sektor
sawit?

Auriga Nusantara

15 September 2021

Outline presentasi

Peran sawit dalam
perekonomian Indonesia

Pajak dari sektor sawit

Fakta penerimaan di sektor
sawit

DBH perkebunan sawit

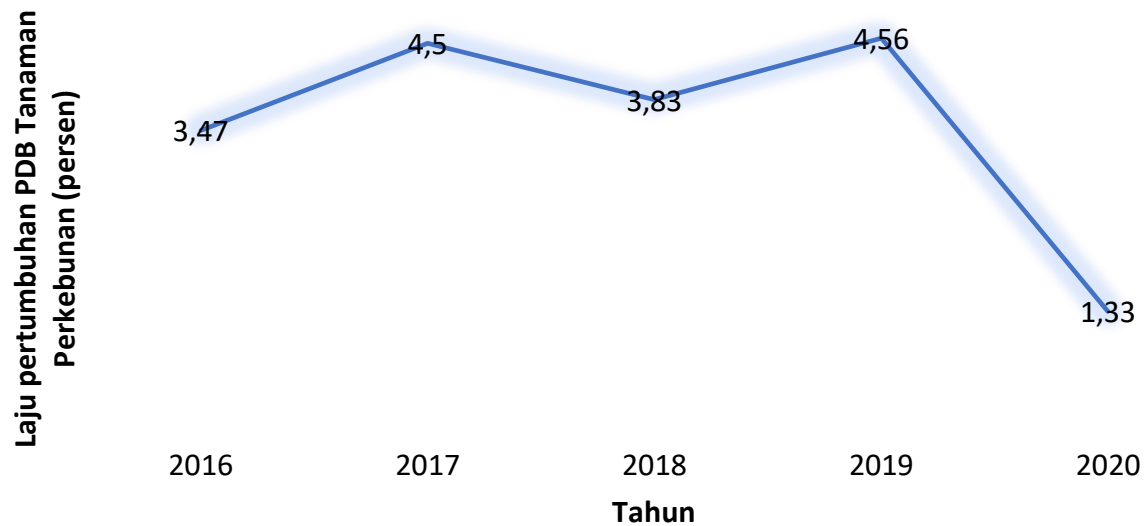
Penutup



Peran sawit dalam perekonomian Indonesia

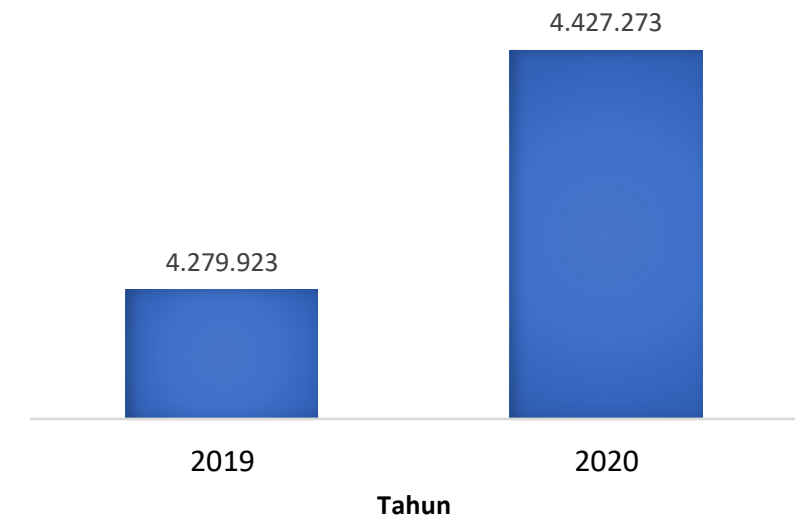
- Selama masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% (BPS, 2020). Namun, sektor tanaman perkebunan tumbuh positif.
- Ekspor minyak sawit Mei 2021 menjadi rekor bulanan tertinggi sepanjang sejarah sebesar US\$ 3,063 miliar.
- Sektor sawit menyerap tenaga kerja sebanyak 147.350 orang pada 2020 - naik 3,4% (Ditjenbun, 2021. Diolah).
- Sektor sawit berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Tanaman Perkebunan 2016-2020



Sumber: BPS (diolah)

Jumlah Tenaga Kerja



Sumber: Ditjenbun (diolah)

Pajak dari sektor sawit

Kebun



PKS



Penjualan CPO
& PKO



Pajak dari kebun

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Perizinan lahan perkebunan | → | PBB |
| 2. Tahap survei dan perencanaan | → | PPh Ps. 23, 26 dan PPN |
| 3. Pembukaan lahan dan pematangan tanah | → | PPh Ps. 21
PPh Ps. 23 dan 26 |
| 4. Persiapan lahan dan infrastruktur | → | PPh Ps. 23,26 dan PPN |
| 5. Tahap pembibitan | → | PPh Ps. 21 |
| 6. Penanaman dan pemeliharaan | → | PPh Ps. 21 |
| 7. Tahap pemanenan | → | PPh Ps. 21 |
| 8. Tahap penjualan TBS | → | PPh Ps. 21
PPh Ps. 25 PPh Ps. 22 |

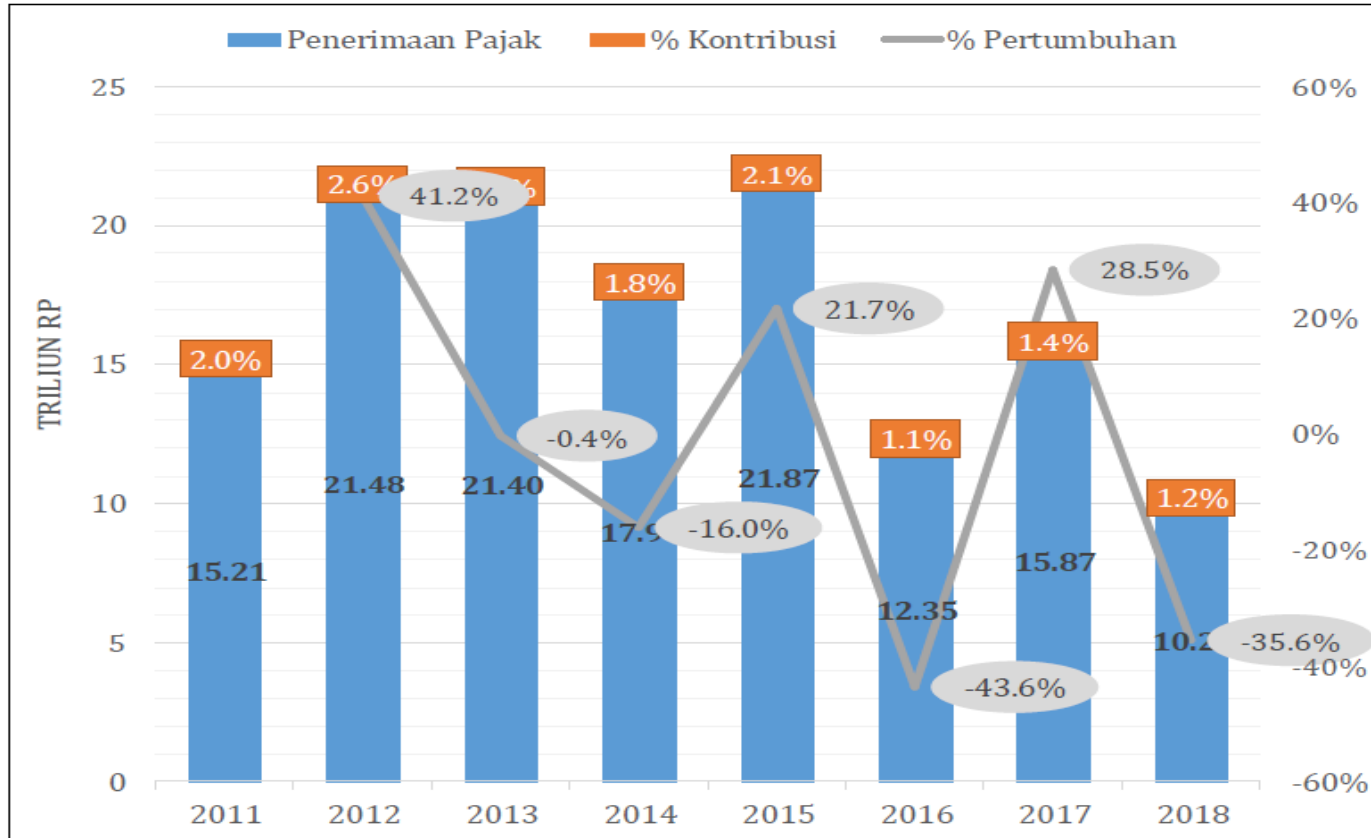
Pajak dari PKS

1. Tahap Pembangunan Pabrik	→	PPh Ps. 23/26 PPh Ps. 23 PPh Ps. 23/26 PPh Ps. 23/26 PPN Masukan
2. Pengadaan TBS	→	PPh Ps. 22
3. Tahap Proses Produksi CPO	→	PPh Ps. 21

Pajak dari penjualan CPO dan PKO

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| 1. Penjualan CPO | → | PPN
PPh Final
PPh Ps. 25 |
| 2. Jasa Olah | → | PPN |

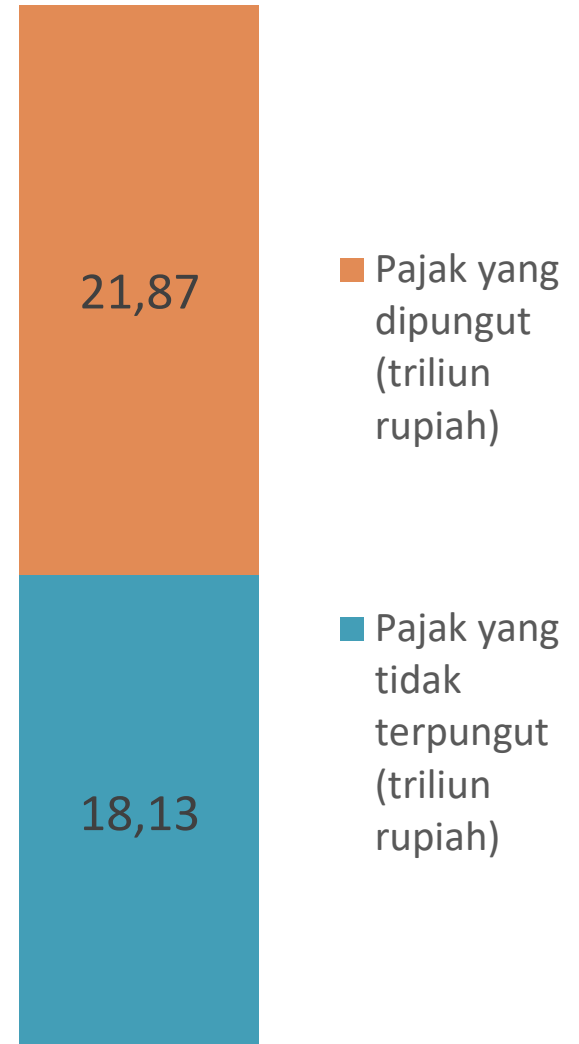
Penerimaan pajak belum optimal



Sumber: DJP, 2018.

Potensi pajak sektor sawit sebesar Rp 40 triliun

Sumber: KPK, 2016

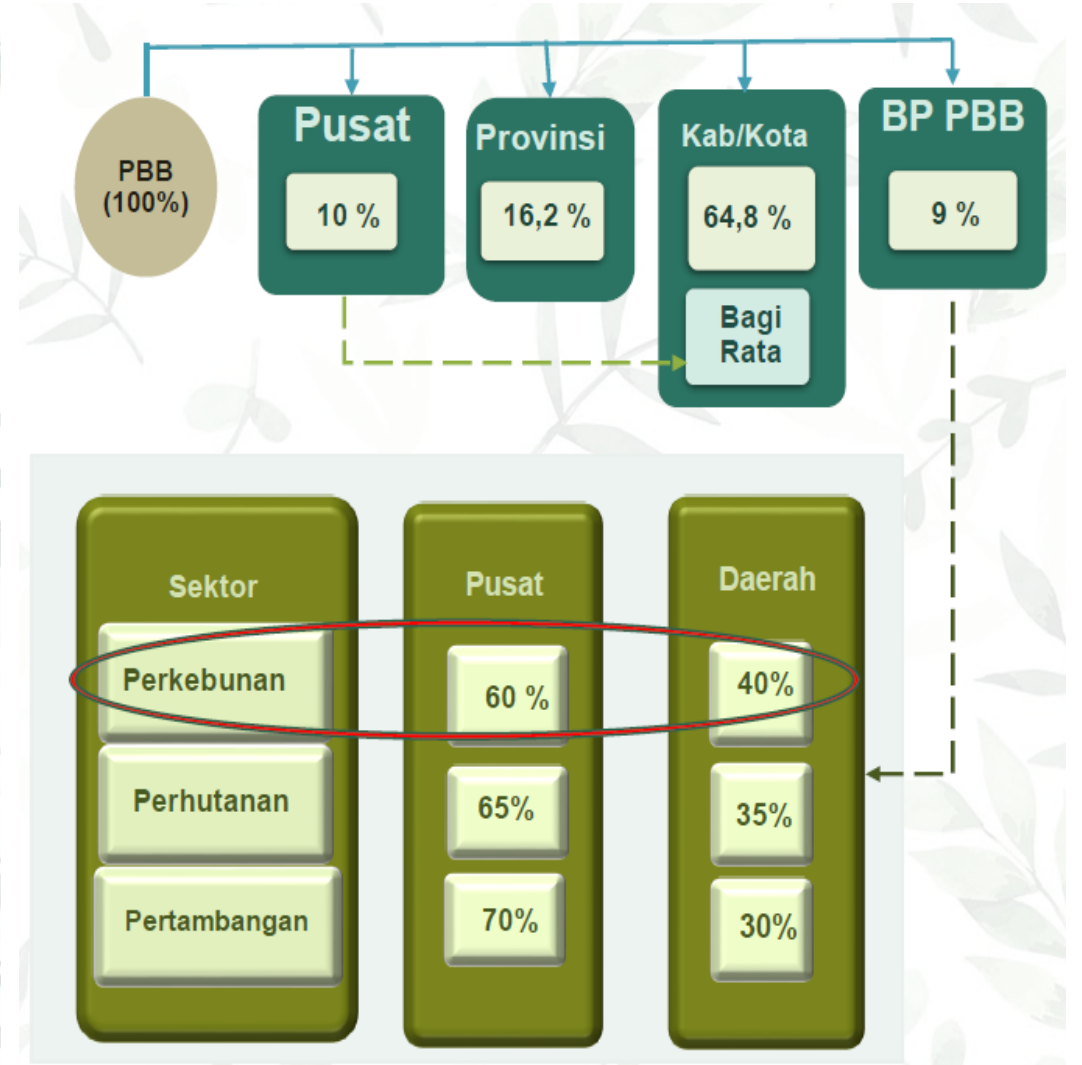
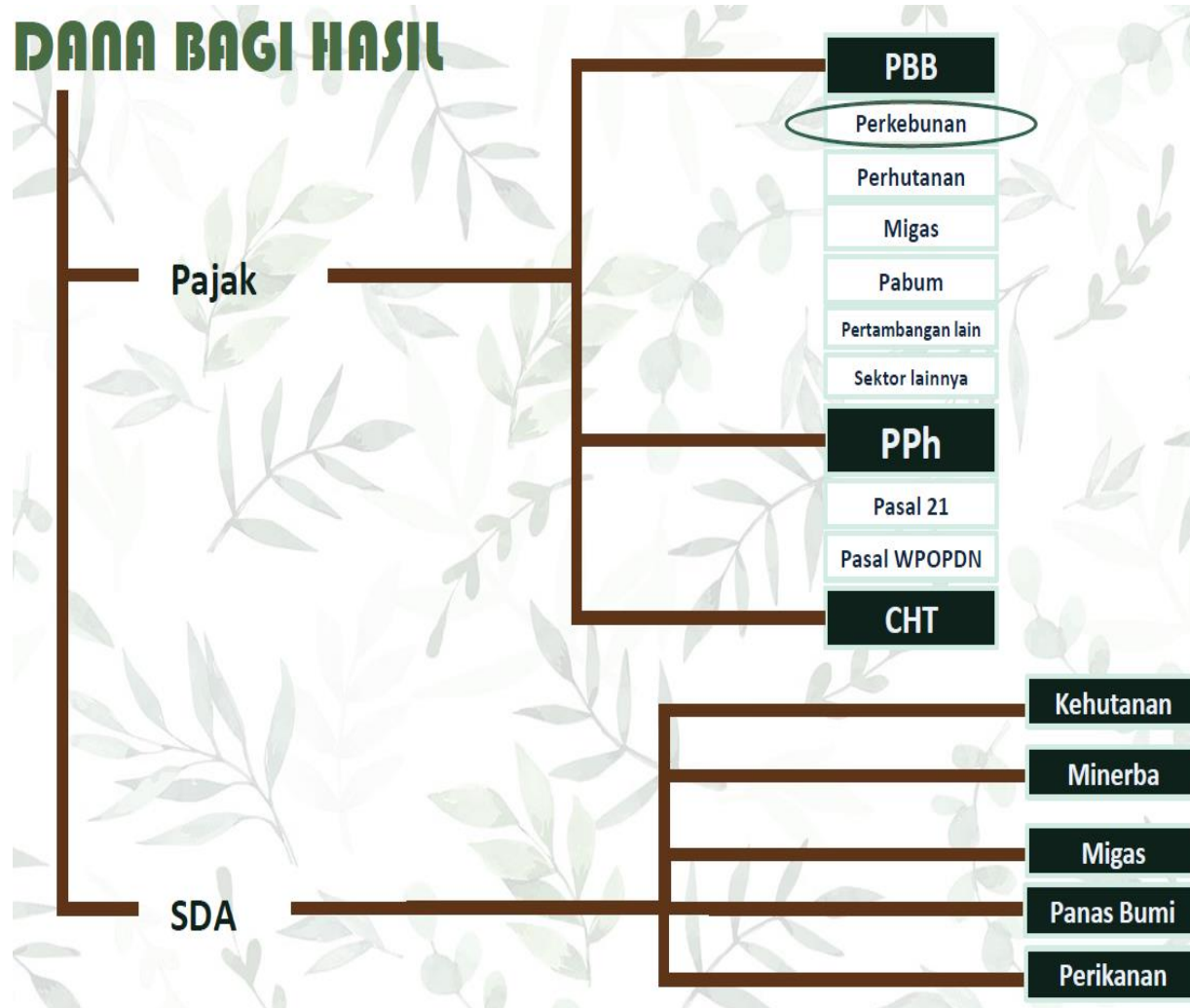


Penerimaan pajak belum optimal (2)

- Pada 1989-2017, minyak sawit mengalami kebocoran perdagangan keluar dengan cara under-invoicing sebesar US\$1,28 miliar (The Prakarsa, 2019).
- Under-invoicing ekspor disinyalir digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalti di dalam negeri (GFI, 2019).

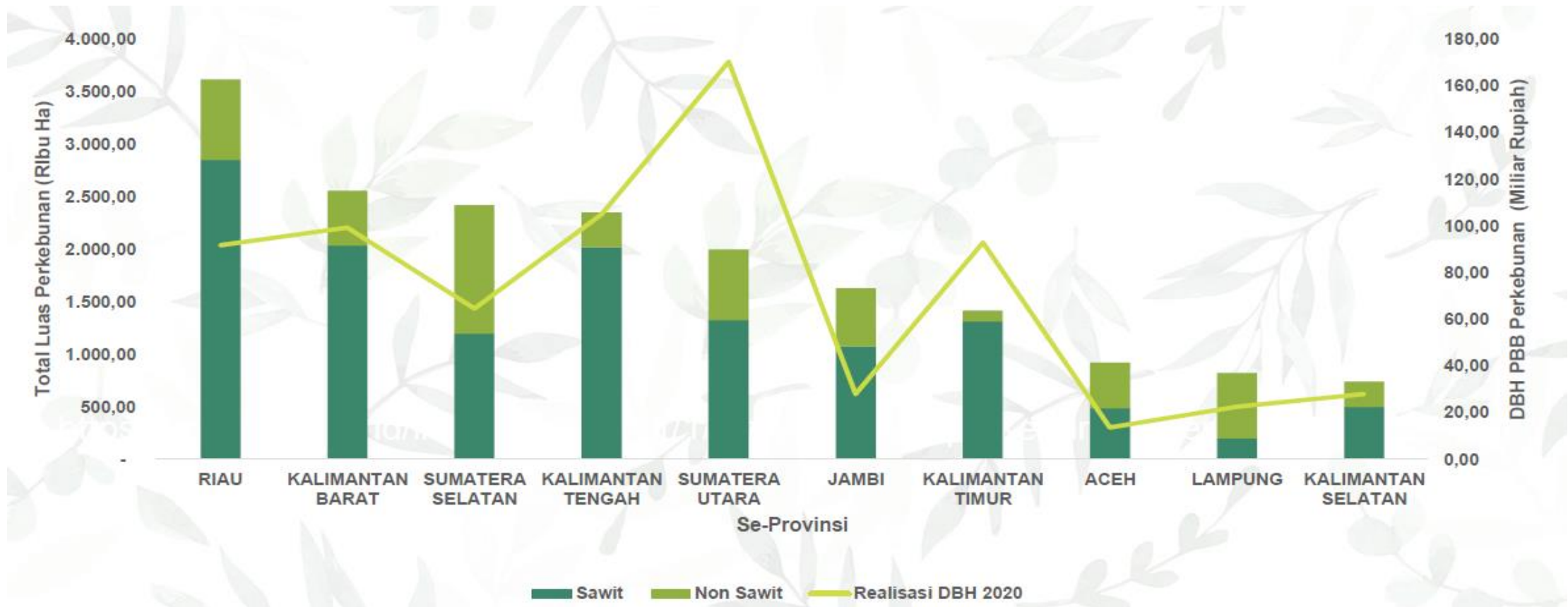
DBH perkebunan sawit

DANA BAGI HASIL

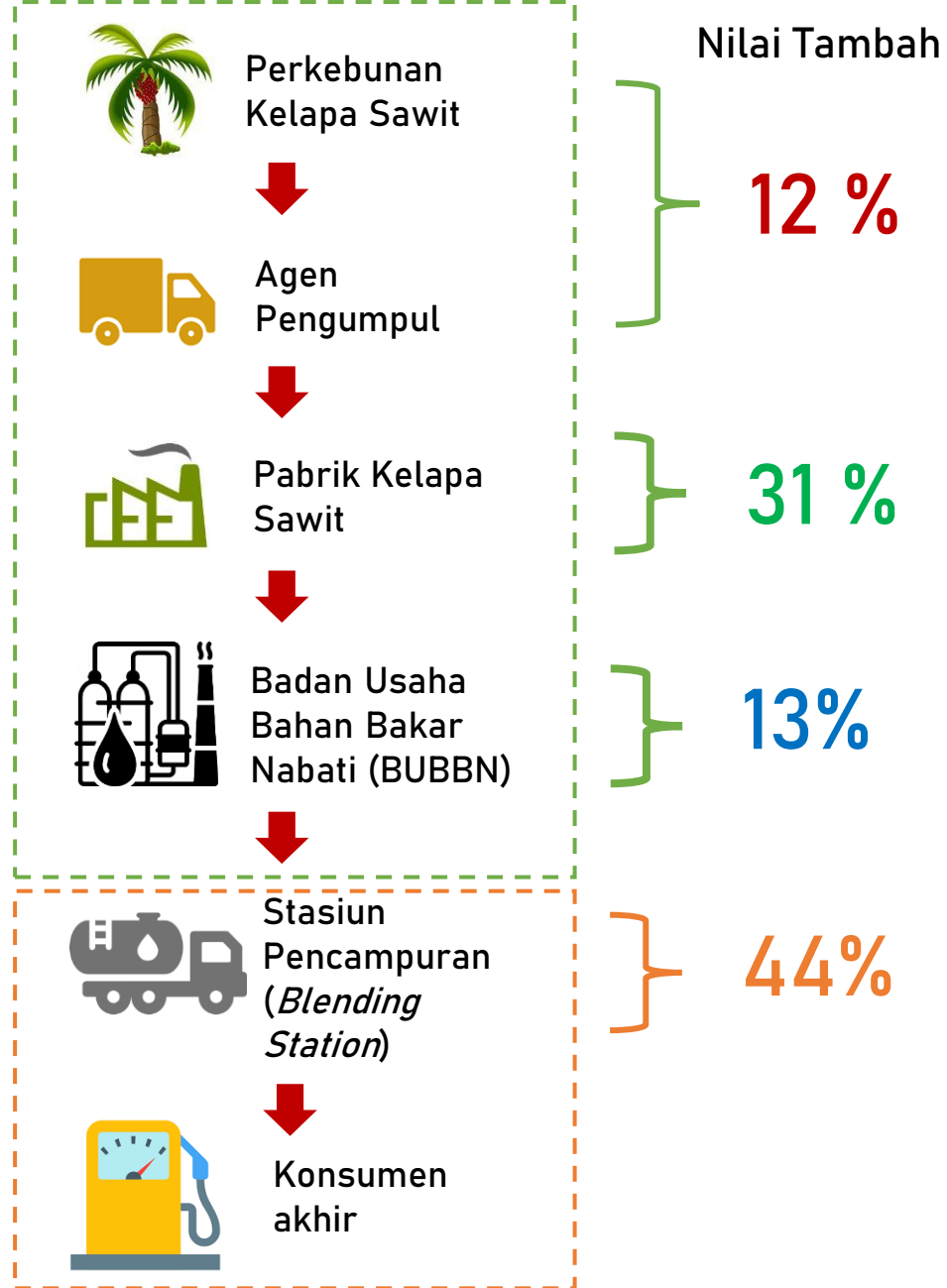


DBH PBB perkebunan sawit (2020)

- Fakta di daerah: kapasitas fiskal rendah, beban tanggung awab besar, dampak ekologi.
- DBH PBB tidak selalu berbanding lurus dengan luas perkebunan karena perhitungan PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor, misal NJOP.



Rantai nilai industri sawit



Sektor hulu (perkebunan) merupakan pihak yang menerima nilai tambah **paling kecil, 12%** dari keseluruhan rantai nilai di Industri sawit nasional, khususnya biodiesel.

Rendahnya nilai tambah di sektor perkebunan sawit diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu **inefisiensi rantai pasok, tidak terbukanya data harga TBS, kelembagaan yang lemah, dominasi sekelompok perusahaan**, dll.

Industri **oleokimia** di Indonesia masih belum banyak berkembang (saat ini ada 19 perusahaan). Industri ini diestimasikan dapat memberi nilai tambah hingga **200%**²



Penutup

- Potensi penerimaan dari sektor sawit masih jauh dari optimal.
- DBH yang diterima oleh daerah dengan kepemilikan kebun sawit sangat kecil.
- Sektor hulu hanya memiliki nilai tambah 12%.
- Perpanjangan moratorium sawit tidak berarti akan mengurangi penerimaan negara.